

ANALISIS KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Moh. Khoiruddin

Institut Agama Islam Al Khoziny Sidoarjo, Indonesia

E-mail: .r11d1n@yahoo.co.id

Abstract: *Curriculum of Islamic education in Indonesia, especially in an environment absolutely unique educational institution that is popular with characteristic of traditionality. Predicate Islam, automatically and logically consequence, that the educational curriculum as intended must have characteristics that set it apart than other types or categories. Islamic education curriculum must be in harmony with the basic principles of Islamic education and the basic principles of Islam. The diversity of Islamic education institutions, led to divergent curricula in Islamic educational institutions, such as schools, madrassas, Islamic schools, and universities tingggi Islam. The diversity of the curriculum of Islamic education institutions, which is caused differences in educational objectives, principles of curriculum development and curriculum and selection. Islamic education curriculum in terms of Islamic education policy analysis, can be seen from the three models, the model of a prospective, retrospective and model of integrative models. Curriculum pesantren and madrasah curriculum should at least use the integrative models where the model is able to combine the two previous models, so that education Islamic schools remain a role model for public education by promoting Islamic education.*

Keywords: *Policy Analysis, Curriculum of Islamic education.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan sebagai proses dan upaya untuk mentransformasikan manusia muda menjadi manusia yang dilekati dengan kemanusiaan sesuai dengan kodratnya, yakni bermanfaat bagi dirinya, sesama, alam lingkungan beserta segenap isi dan peradabannya. Dalam hakikat

yang mulia tersebut, pada hakikatnya lembaga pendidikan menemui sejumlah tantangan yang wajib diperhatikan. Tantangan berat salah satunya ialah laju zaman yang terus berubah baik positif maupun negatif. Respon dunia pendidikan Islam terhadap perkembangan zaman adalah dengan memasukkan aspek-aspek terkait dengan perkembangan zaman ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Aspek-aspek tersebut baik terkait dengan perkembangan dunia Ilmu pengetahuan dan, termasuk juga informasi. Secara ideal, kurikulum pendidikan Islam diharapkan mampu meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan *soft skill* dan *hard skill* yang berupa sikap, ketrampilan dan pengetahuan.

Dalam sebuah negara, kurikulum tidak lepas dari pengaruh para penguasa, dikarenakan para penguasa memerlukan dukungan institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Dengan memberikan pengaruh pada kurikulum pendidikan, maka para penguasa bisa memasukkan ide-ide mereka, yang mana ide-ide mereka merupakan penunjang dalam rangka membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis ingin membahas kurikulum pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam, yang merupakan tinjauan analisa kebijakan pendidikan islam.

Pengertian Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum berasal dari bahasa Yunani *curir* atau *curere* dengan makna jarak yang harus ditempuh dalam lomba lari. Berarti, awalnya berasal dari kancah atau kegiatan olahraga. Ketika akhirnya masuk ke dunia pendidikan, ada yang mengartikan kurikulum sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Pengertian kurikulum pun terus bergeser menjadi pengalaman belajar yang dicapai oleh peserta didik di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah. Selanjutnya kurikulum diartikan sebagai program atau rencana pembelajaran yang diberlakukan pada sebuah institusi dan aktifitas pendidikan.

Dunia pendidikan dimanapun sangat memerlukan kurikulum, sebagai pegangan dan sekaligus penentu arah yang harus ditempuh oleh institusi pendidikan. Dan tentunya kurikulum tersebut

disertai rangkaian aktifitas pembelajarannya, guna mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sedemikian penting kurikulum, sehingga perhatian para ahli tidak lagi tertuju pada soal perlu atau tidak kehadirannya, melainkan telah bergeser ke arah bagaimana merancang dan mengembangkannya setepat mungkin. Agar dengan begitu kegiatan pendidikan berjalan lancar, dapat diperbaiki dari waktu ke waktu, sehingga terwujudlah kualitas proses dan produk pembelajaran di setiap institusi dan aktifitas pendidikan. Tanpa kehadiran kurikulum, yang terjadi pada lembaga pendidikan formal khususnya, adalah ketidakjelasan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan sekaligus tujuan yang hendak dicapai.

Di dalam struktur kurikulum terkandung sejumlah unsur pokok yang satu dengan lainnya saling terkait sedemikian rupa, sehingga membentuk sistem kerja edukatif yang terpola secara padu dan jelas, dalam arti tergambar dari mana titik berangkatnya dan hendak dibawa ke arah mana rangkaian aktifitas pembelajaran pada sebuah institusi pendidikan dilakukan. Sejumlah unsur pokok kurikulum setidaknya memuat tujuan, materi, metode, media dan evaluasi. Jika fungsi lembaga pendidikan bisa diibaratkan laksana pemandu rombongan yang tengah melakukan perjalanan, maka yang paling awal harus jelas adalah ke arah mana tujuannya. Kejelasan arah dan tujuan sangat penting, karena menjadi pijakan untuk merancang kendaraan apa yang paling cocok dan hendak dipakai, memilih sopir profesional sesuai dengan jenis kendaraan tersebut, menyiapkan bekal dan perabot pendukung yang diperlukan, dan untuk mengetahui serta menjamin sukses pencapaian tujuan maka perlu dikontrol dengan cara tertentu.

Komponen utama atau pokok yang harus ada dalam struktur kurikulum adalah tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh kegiatan pembelajaran, materi atau bahan pembelajaran sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan, metode atau cara yang ditempuh dalam aktifitas pembelajaran, media sebagai alat bantu untuk mempermudah pencapaian tujuan dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan aktifitas pembelajaran tersebut. Sedikit berbeda dengan itu, ada yang memandang cukup empat komponen saja yang harus ada, yakni tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan, isi kurikulum berupa pengetahuan, informasi, aktifitas

dan pengalaman yang harus ditempuh oleh peserta didik, metode yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian atau evaluasi untuk mengukur hasil pembelajaran. Di sini, komponen media disatukan dengan metode pembelajaran.

Menurut spirit ajaran Islam dan tradisi edukatif kaum muslimin, istilah kurikulum sebagaimana biasa dipergunakan pada dunia pendidikan, dikenal dengan sebutan *manhaj*, yaitu jalan terang atau jalan yang dilalui oleh manusia diberbagai bidang kehidupan. Pendapat lain, memaknai jalan terang sebagai terjemahan kata *manhaj* atau kurikulum, dengan perangkat rencana dan media guna mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Pemakaian istilah jalan terang kebalikan dari jalan gelap atau remang-remang, untuk menyebut kurikulum pendidikan Islam memang tepat dan dilandasi pertimbangan yang cermat serta mendasar, karena mencerminkan sikap tegas, agar dalam menjalani aspek kehidupan dimanapun juga, kaum muslimin selalu berpegang teguh pada ajaran al-Qurán dan sunnah Nabi, agar tidak ragu-ragu, merasa bingung atau tersesat di tengah jalan. Juga sekaligus menegaskan bahwa ajaran Islam memandang serta memposisikan aktifitas pendidikan begitu penting di tengah kehidupan ini, sehingga harus selalu memperoleh perhatian serius termasuk ketika menyusun atau mengembangkan kurikulum yang berperan sangat penting dalam mewarnai seluruh proses dan produk kegiatan edukatif tersebut.

Prinsip Dasar Kurikulum Pendidikan Islam

Melekatnya sifat atau predikat Islam, otomatis terkandung makna dan konsekuensi logis, bahwa kurikulum pendidikan sebagai dimaksud pastilah memiliki ciri khas, yang membedakannya dibanding jenis atau kategori yang lain. Dalam uraian ini, identifikasi ciri khas kurikulum pendidikan Islam diikat dalam formulasi istilah prinsip dasar, artinya sesuatu yang harus ada dan menjiwai secara kokoh seluruh kegiatan edukatif tersebut. Landasan pijak logikanya adalah, kurikulum pendidikan Islam harus selaras dengan prinsip dasar pendidikan Islam, sementara prinsip dasar pendidikan Islam bersumber dari prinsip dasar ajaran Islam. Konsekuensinya, prinsip dasar kurikulum pendidikan Islam

tidak bisa lain, kecuali harus disusun berlandaskan prinsip dasar ajaran Islam.

Sejumlah prinsip dasar kurikulum pendidikan Islam adalah sebagai berikut: *pertama*, berjalan sempurna dengan ajaran Islam. Ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia agar mencapai kebahagiaan hakiki dan sebaliknya terhindar dari penderitaan abadi. Kurikulum pendidikan Islam, sebagai wahana untuk mewujudkan idealitas tersebut, tidak mungkin eksis pada kesejatiannya sendiri, kecuali terajut dalam jalinan sempurna dengan totalitas ajaran Islam. Pada konteks ini, tidak berlaku adagium: dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia, apalagi terkandung maksud untuk sekaligus mengabaikan atau lebih-lebih mendepak posisi Tuhan dari kehidupan, *na'ūdzubillah*. Menurut prinsip dasar ajaran Islam, hidup manusia bergantung pada Allah swt., dan sebaliknya keMahakuasaan Allah swt tidak bergantung pada kehidupan manusia. Mengingat aktifitas pendidikan Islam hanya mungkin berlangsung ketika manusia hidup, padahal kehidupan manusia bergantung pada Allah swt, sang pemilik ajaran Islam, maka konsekuensi logisnya adalah tidak mungkin ada pendidikan Islam yang prinsip dasar kurikulumnya terlepas atau tidak terhubung sempurna dengan totalitas ajaran Islam.

Kedua, membangun keseimbangan dunia dan akhirat. Idealitas substansi kurikulum pendidikan Islam, pada hakikatnya adalah bagaimana merancang dan menghantarkan peserta didik untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Keduanya diupayakan terwujud secara berimbang, sesuai dengan permohonan yang selalu dipanjatkan kaum muslimin dalam berdoa. Kalau pada kenyataannya banyak institusi dan aktifitas pendidikan Islam dengan kurikulum yang menghasilkan lulusan yang timpang, dalam arti menguasai pengetahuan umum dan teknologi namun lemah di bidang ilmu dan amaliah keagamaan, atau sebaliknya menguasai ilmu dan amaliah keagamaan namun lemah di bidang pengetahuan umum dan teknologi, sesungguhnya terjadi akibat keterpaksaan historis-sosiologis yang menimpa kaum muslimin di era modern, dan tidak bersumber dari idealitas ajaran Islam. Terbukti akhir-akhir ini tumbuh dan terus berkembang institusi pendidikan Islam yang melalui keseimbangan struktur kurikulum berhasil melahirkan peserta

didik yang kokoh iman dan taqwanya kepada Allah swt, sekaligus hebat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga, menempatkan pendidik dalam posisi terhormat. Prinsip dasar ini sangat penting, mengingat sedemikian gencar pengaruh teori pendidikan Barat sekuler, yang cenderung menempatkan pendidik sekedar berfungsi atau difungsikan sebagai fasilitator, dalam arti orang yang kerjanya menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam aktifitas pendidikan. Penempatan guru, ustad atau dosen, seolah dalam fungsi pelayan murid, siswa atau mahasiswa yang justru diangkat posisi mereka ke predikat peserta didik, yang berarti sejajar dengan pendidik, tidak selaras dengan kedudukan hakiki pendidik selaku pemegang mandat dari Allah swt, para Nabi, dan kalangan ulama untuk mengajarkan kepada umat manusia kitab suci dan dasar-dasar pokok ilmu pengetahuan. Di samping itu, juga tidak sesuai dengan marwah strategi lainnya sebagai teladan agung (*uswah hasanah*) dalam kehidupan. Dengan posisi yang kokoh dan terhormat selaku penyusun dan sekaligus pelaksana kurikulum pendidikan Islam, diharapkan tercipta keseimbangan peran edukatif secara harmonis, tidak lagi terjadi penjungkirbalikan atau degradasi martabat pendidik, yang berakibat negatif terhadap pembentukan akhlak atau karakter anak muda yang memprihatinkan dewasa ini.

Keempat, memperlakukan peserta didik sebagai pusat orientasi. Walaupun teori pendidikan modern pada umumnya menghendaki idealitas semacam itu, namun faktanya cenderung menjadi slogan, dan tidak mudah diwujudkan dalam kenyataan. Malah sebaliknya, betapa sering dunia kurikulum pendidikan justru terombang-ambing oleh daftar keinginan pihak-pihak tertentu, untuk memasukkan aspek materi ini dan itu, tanpa pencermatan secara mendalam di mana dan sejauh mana relevansinya dengan kepentingan peserta didik. Prinsip dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam, jelas tidak menghendaki sikap dan langkah seperti itu, mengingat banyak sekali ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mengajarkan, bahwa putra putri kita adalah pemilik sah masa depan mereka, sehingga tidak laik jika dunia edukatif yang begitu penting dibuat sembarangan, dijadikan ibarat keranjang sampah atau kelinci percobaan, guna memenuhi keinginan pihak lain yang secara

hakiki belum tentu ada manfaatnya.

Kelima, bijaksana dalam menyikapi setiap perubahan. Tidak bisa disangkal, bahwa perubahan selalu terjadi dalam realitas kehidupan ini, sehingga langkah mengakomodasinya dalam penyusunan kurikulum pendidikan, adalah keniscayaan yang sulit atau bahkan mustahil dihindarkan. Namun harus disadari, bahwa perubahan itu dapat berlangsung tanpa batas dan landasan kebenaran serta manfaatnya bagi umat manusia. Jangan sampai terjadi, hanya atas nama perubahan dan demi perubahan yang satu ke perubahan yang lain, hidup manusia terus menerus direcoki atau digoncang, sehingga tidak pernah menikmati ketenangan. Sementara, ajaran Islam memegang teguh, bahwa setiap perubahan harus dikontrol oleh pertanyaan: dari mana asal gagasannya, hendak mengarah kemana dan apa gunanya bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat? Jadi manfaat perubahan itu harus tunduk pada sinar bijak ajaran Islam, dan tidak sebaliknya justru ajaran Islam yang hanyut dalam perubahan. Atas dasar itulah, maka prinsip dasar kurikulum pendidikan Islam adalah terbuka menerima perubahan, asal diketahui manfaatnya bagi peserta didik dan masyarakat.

Keenam, kurikulum Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Islam. Meskipun telah sedemikian banyak uraian seputar kurikulum pendidikan Islam, akan tetapi untuk menampilkan struktur atau wujud konkritnya, bukanlah persoalan mudah. Sebab dalam kenyataan riil pastilah bergantung pada jenis dan jenjang institusi serta corak kegiatan pendidikan kaum muslimin di berbagai penjuru dunia sejak awal pertumbuhannya pada abad pertengahan hingga di zaman modern dewasa ini. Sebagai contoh, sesuai dengan realitas kelembagaan yang beraneka macam di Indonesia, otomatis terdapat begitu banyak versi kurikulum pendidikan Islam di negara ini. Ada kurikulum pendidikan Islam untuk pesantren, kurikulum pendidikan Islam untuk madrasah dari taman kanak-kanak hingga tingkat menengah atas, kurikulum pendidikan Islam untuk sekolah umum, kurikulum pendidikan Islam untuk perguruan tinggi umum, kurikulum pendidikan Islam untuk perguruan tinggi keagamaan, dan lain sebagainya.

Versi Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia

Berbagai gambaran ringkas tentang aneka versi kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, lebih jelasnya dipandang perlu menguraikan satu persatu secara ringkas menurut perbedaan jenis kelembagaannya sebagai berikut :

Kurikulum Pesantren

Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, dan pernah mengalami suasana kesederhanaan begitu lama, sampai di zaman modern sekarang inipun dunia pesantren tetap memiliki ciri khas tersendiri di banding jenis institusi pendidikan formal seperti madrasah dan sekolah. Di masa lalu, jenis lembaga pendidikan ini tidak mengenal kurikulum, juga istilah manhaj dalam bahasa Arab, apalagi menempatkannya sebagai rancangan atau pegangan baku dalam kegiatan pendidikan. Selama rentang waktu yang cukup panjang, kegiatan pendidikan di pesantren bertumpu pada spesialis keilmuan kyai, selaku pemilik dan sekaligus pemimpin utamanya. Masyarakat di Indonesia lebih mengenal kitab apa yang dianggap penting dan diajarkan kepada para santri, bukan kurikulum seperti apa yang dipergunakan dalam aktifitas pembelajaran. Karenanya, ada sebutan pesantren jurumiyah, pesantren alfiyah, pesantren ihya' ulumuddin dan seterusnya, yang tidak lain adalah nama-nama kitab terkenal dan itulah makna kurikulum dulu bagi dunia pesantren.

Sungguh unik realitas kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di lingkungan institusi pendidikan yang populer dengan ciri khas tradisionalisnya tersebut. Bagaimana tidak, pesantren tradisional memiliki jenjang shifir awal, shifir tsani, shifir tsalis dan seterusnya, masing-masing dengan kurikulum yang berbeda. Ada juga pesantren yang kecenderungannya selalu mengarahkan aktifitas pendidikannya ke pendalaman ilmu-ilmu al-Qurán, tafsir, hadist, fiqh, tasawuf dan sebagainya, yang juga disertai kurikulum masing-masing. Sementara di sisi lain, pesantren modern, ada yang memiliki puluhan jenis institusi pendidikan formal. Dalam hal ini adalah madrasah dan sekolah, dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga perguruan tinggi. Perbedaan kurikulum juga terjadi pada jenjang perguruan tinggi di lingkungan pesantren, antara yang berafiliasi dengan kementrian agama dan kemenristekdikti Republik

Indonesia.

Untuk mempertahankan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, kalangan pesantren besar dan modernpun, biasanya tetap menyelenggarakan aktifitas pendidikan non formal dalam wujud pengajian kitab kuning, baik dengan metode sorogan, wetonan maupun bandongan. Demikian pula, untuk maksud dan tujuan yang sama walaupun sudah banyak unit pendidikan modern, sehingga sering kali masih diselenggarakan juga madrasah diniyah, dengan sistem pengajaran klasik namun tetap menggunakan kitab kuning sebagai inti kurikulum pembelajarannya.

Kurikulum Madrasah

Dari uraian tersebut di atas, sudah terlihat betapa erat kaitan antara dunia madrasah dengan pesantren, walaupun tidak semua madrasah muncul dari atau berkembang di lingkungan pesantren. Dalam konteks realitas keberadaan institusinya, baik berada di lingkungan atau di luar pesantren, merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi terjadinya perbedaan struktur dan muatan kurikulum. Kurikulum madrasah di lingkungan pesantren, cenderung lebih mendalam ilmu dan amaliah keagamaannya, mengingat sebagian materi pembelajaran merujuk dan berdasarkan pada kitab kuning. Sementara madrasah yang berlokasi di tengah masyarakat biasa, cukup menggunakan kurikulum dari kementerian agama, yang muatannya justru lebih banyak pengetahuan umum di banding ilmu dan amaliah keagamaan. Perbedaan itu terjadi, bukan saja pada madrasah swasta, melainkan juga madrasah yang berstatus negeri.

Pada masa lalu, realitas kurikulum madrasah lebih bervariasi lagi, sesuai dengan aneka jenis dan misi kelembagaannya yang memang sangat beragam. Ada madrasah yang secara murni bertujuan untuk membina peserta didik agar secara penuh mendalami ilmu keagamaan, yang erorientasi pada kepentingan dakwah, ada yang spesifik bertugas mencetak guru agama Islam dan lain sebagainya. Berbeda orientasi kelembagaannya, otomatis juga berbeda struktur dan muatan kurikulum yang dipakai sebagai pegangan dalam aktifitas pembelajaran sehari-hari.

Realitas kurikulum madrasah modern dewasa inipun, sering menjadi sasaran kritik oleh kalangan pemikir pendidikan Islam.

Sindiran populernya adalah kurikulum setengah hati atau konyol dalam istilah lain. Maksudnya, pendalaman agama terlanjur dikurangi alokasi waktunya untuk mengejar ilmu pengetahuan umum dan teknologi, namun hasil yang dicapai justru tidak tuntas dalam menguasai ilmunya. Produk kurikulum seperti ini terlihat jelas, misalnya ketika lulusan Madrasah Aliyah (MA) melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Memilih jalur perguruan tinggi umum, kalah bersaing dengan tamatan SMA. Sebaliknya masuk perguruan tinggi agama kekurangan bekal untuk mendalami bidang studi keagamaan yang tertulis dalam kitab klasik berbahasa Arab. Untuk mengatasi persoalan tersebut, jalan terbaik seyogyanya ditempuh mengasramakan peserta didik, agar memiliki waktu belajar 24 jam setiap hari.

Kurikulum Sekolah Islam

Dilihat dari segi muatan kurikulumnya, akhir-akhir ini cukup sulit membedakan secara tegas antara madrasah dan sekolah Islam. Realitas keduanya sudah banyak mengalami perubahan, jauh berbeda dengan apa yang biasa dikenal masa lalu. Dahulu ada kesan madrasah pasti lebih menguasai bidang keagamaan di banding murid sekolah umum termasuk yang berlabel Islam sekalipun. Dewasa ini, penilaian semacam itu kurang tepat, atau malah keliru sama sekali. Karena banyak murid sekolah Islam yang hafal al-Qur'an pada bagian tertentu di samping lancar berbahasa Arab sehari-hari. Sebaliknya, berapa banyak siswa madrasah yang tidak hafal surat-surat pendek dalam juz 'amma, sekalipun juga tidak terampil berbahasa Arab. Terjadinya deregulasi sistem aktifitas pendidikan kaum muslimin, yang antara lain ditandai dengan persaingan ketat antara madrasah dan sekolah Islam, adalah keniscayaan faktual yang mesti dicermati oleh berbagai pihak terkait adanya langkah perbaikan kurikulum sekolah Islam, jelas berperan sebagai salah satu kuncinya.

Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan

Yang dimaksud dengan perguruan tinggi keagamaan, adalah jenjang pendidikan setelah tingkat menengah atas yang mengarahkan program akademisnya untuk mencetak sarjana yang secara khusus memiliki keahlian ilmu dan amaliahnya keislaman, seperti bidang aqidah, syariah, dakwah, adab dan tarbiyah, tanpa

adanya upaya untuk melengkapinya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern seperti bidang ekonomi, politik, hukum, teknik, kedokteran dan sejenisnya.

Di masa lalu kurikulum perguruan tinggi keagamaan cenderung terkonsentrasi pada bidang agama dalam pengertian sempit, mengingat begitulah tujuan semula untuk mencetak ulama atau tenaga ahli di bidang keagamaan. Akan tetapi dalam perkembangan pada era modern, dimasukkan kedalamnya pengetahuan umum seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, hukum dan lain-lain, sebagai alat atau ilmu pendukung untuk memudahkan tugas para sarjana itu dalam mengabdikan diri di tengah masyarakat.

Kurikulum Perguruan Tinggi Islam

Islam memiliki substansi ajaran yang sangat luas dan lengkap, mulai dari bidang aqidah dan syariah hingga ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Atas dasar itulah, ketika predikat Islam melekat pada istilah perguruan tinggi dan tanpa diikuti agama, sehingga menjadi perguruan tinggi Islam, maka lahan garap keilmuannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang dibutuhkan untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Corak kurikulum perguruan tinggi Islam, sebagaimana dimaklumi tergantung pada jenis fakultas, jurusan dan atau program studi yang bersangkutan, mengingat indikator paling substansial dari perbedaan fakultas, jurusan maupun program studi memang terletak atau ditandai oleh perbedaan kurikulum.

Konsep Dasar Pembinaan dalam Pemilihan Kurikulum

Pandangan yang berbeda tentang pengetahuan dan nilai berikut implikasinya untuk pendidikan memberi peluang bagi pengembangan kurikulum untuk menggunakan beberapa dasar pembinaan dalam menetapkan suatu kurikulum. Menurut Rotledge dan Kegan Paul yang dikutip oleh Ismail Thoib menetapkan beberapa alasan pemilihan kurikulum untuk merumuskan pendidikan.

Pertama, pembinaan berdasarkan kegunaan. Dasar pembinaan pertama atas pilihan kurikulum adalah pembinaan berdasarkan kurikulum berdasarkan prinsip kegunaan. Menurut

prinsip ini, kurikulum yang dipilih ditentukan berdasarkan kegunaannya bagi peserta didik. Pengertian guna bisa berarti adanya manfaat praktis untuk pemenuhan kebutuhan hidup, juga bisa berarti mana yang lebih membawa ke arah pencapaian kebahagiaan manusia.

Kedua, pembenaran berdasarkan rasionalitas. Pembenaran pilihan kurikulum berdasarkan rasionalitas adalah pembenaran dari sudut sejauh mana kurikulum yang dimaksud dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya. Pembenaran kurikulum berdasarkan prinsip rasionalitas ini, pendidikan diarahkan untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya dalam berbagai bentuk pengetahuan.

Ketiga, pembenaran berdasarkan prinsip warisan budaya. Dalam pembenaran kurikulum berdasarkan prinsip warisan budaya ini, pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dipandang sebagai khazanah budaya yang mesti diwariskan kepada generasi penerus dalam suatu masyarakat. Kurikulum dalam suatu pendidikan bisa dibenarkan atau dipertanggungjawabkan kalau kurikulum itu mampu membantu peserta didik untuk mewarisi seraya menghidupi tradisi budaya yang dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat.

Kurikulum Pendidikan Islam ditinjau dari Analisa Kebijakan Pendidikan Islam

William Dunn, sebagaimana Nanang Fatah membuat satu pengertian tentang analisis kebijakan dengan menyatakan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan melalui metode inkuiri dan argumentasi berganda dalam rangka menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan sesuai dengan suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis, sehingga mampu memecahkan masalah dalam kebijakan. Kegiatan analisis digunakan untuk melibatkan pemahaman dasar bagi manusia dalam upaya pemecahan masalah secara praktis. Tidak lagi hanya sebuah argumentasi sekedar rasional.

Ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan menurut Dunn, yaitu model prospektif, retrospektif dan integratif. Model prospektif, yaitu model analisis kebijakan yang dilakukan sebelum

sebuah kebijakan diterapkan. Atas pengertian tersebut, maka model ini lalu diidentikkan dengan model prediktif, atau dalam bahasa lain disebut dengan ramalan (*forecasting*). Karena sifatnya sebagai ramalan maka model melakukan prediktif kemungkinan-kemungkinan penerapan kebijakan yang akan diusulkan.

Sedangkan model retrospektif, yaitu kebalikan dari model prospektif, bagaimana setelah kebijakan itu dilaksanakan. Model ini sering dinamakan model analisis evaluatif, menganalisa dampak terhadap pelaksanaan kebijakan. Adapun model integratif, yaitu memadukan kedua model di atas. Model ini juga dinamakan dengan model analisis komprehensif atau holistic, karena analisisnya dilakukan atas konsekuensi sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan. Model ini biasanya menggunakan teknik ramalan dan evaluasi secara integratif.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman, kurikulum madrasah juga mendapat tantangan yang sangat berat. Apabila tidak melakukan reformulasi terhadap kurikulum pendidikan madrasah yang ada, maka keberadaan madrasah lambat laun akan ketinggalan, yang pada gilirannya ditinggalkan umat sebagai peminat pendidikan madrasah.

Pendidikan Islam sebenarnya telah berlangsung selama berabad-abad yang merupakan tradisi pembelajaran Islam sebagai sebuah akar. Bahkan pendidikan pesantren yang kemudian ada sistem madrasah telah banyak diakui sebagai karakteristik pendidikan asli Indonesia. Modernisasi madrasah dimulai sejak kedatangan penjajah dari bangsa Eropa, Belanda khususnya yang menerapkan sistem pendidikan klasikal, sebagian orang mengatakan pendidikan berbasis sekuler. Pendidikan pesantren dengan kurikulum pembelajarannya ilmu-ilmu naqliyah seperti al-qur'an, hadist, ilmu-ilmu tauhid, fiqh dan sejarah Nabi Muhammad serta mantiq yang dipelajari secara tradisional, dan dilakukan seadanya. Sistem hafalan menjadi primadona pembelajaran hampir semua pesantren, yang didalamnya tentu madrasah telah berjalan sejak pesantren itu ada hingga hari ini.

Sementara itu, agar pendidikan madrasah diniyah dapat meneruskan ke jenjang pendidikan jalur non madrasah, maka pendidikan diniyah yang dikategorikan sebagai pendidikan keagamaan Islam harus memiliki muatan kurikulum wajib diluar

mata pelajaran agama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 PP tersebut, yaitu: Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Begitu juga kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan materi muatan pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

Dalam teori analisa kebijakan dikenal dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan madrasah. Data apa adanya telah dipaparkan sebagaimana gambaran realita bahwa madrasah sejak berdirinya memang untuk membentuk peserta didik agar lebih mengedepankan nilai-nilai agama Islam. Sementara pendekatan normatif digunakan sebagai tawaran dalam bentuk norma atau resep dalam menyelesaikan sebuah masalah. Melalui pendekatan yang kedua ini negara telah membuat bermacam-macam regulasi untuk memperkuat posisi madrasah sebagai bentuk tawaran penyelesaian masalah yang terjadi dalam dinamika perkembangan madrasah dalam setiap periode politik. Oleh karena itu, maka yang menjadi garapan selanjutnya adalah bagaimana mengelola madrasah dengan berbasis pengelolaan pendidikan yang modern dengan tetap tidak kehilangan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Seperti kaidah yang sering kita dengar, *al-muhafadhatul bi al-qodimi al-sholih wal-ahdu bi al-jadiidi bi al-ashlah*.

Kesimpulan

Dari kajian tentang analisis kebijakan kurikulum pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kurikulum pendidikan Islam memiliki ciri khas kurikulum tersendiri dibandingkan dengan kurikulum secara umum. Kurikulum pendidikan Islam disesuaikan dengan ajaran dasar Islam.

Kurikulum pendidikan Islam ditinjau dari analisa kebijakan pendidikan Islam, bisa dilihat dari tiga model yang ditawarkan

oleh Dunn, yaitu model prospektif, model retrospektif dan model integratif. Kurikulum pesantren maupun kurikulum madrasah setidaknya harus menggunakan model integratif yang mana model tersebut mampu menggabungkan dua model sebelumnya, sehingga pendidikan pesantren dan madrasah tetap menjadi pendidikan idola bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan pendidikan agama Islam.

Daftar Rujukan

- Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, Cetakan ke 4, 2001.
- Babun Suharto, *Managing Transitions : Tantangan dan Peluang PTAI di Abad Informasi*, Jember : STAIN Jember Press, 2014.
- Colin J. Marsh dan George Wilis, *curriculum alternative approaches : Ongoing issues*, New Jersey : Merry Prantice Hall, 1999.
- Hamdani Ihsan, Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung : Cv Pustaka Setia, 2001.
- Hasan Langgulang, *Manusia dan Pendidikan : Suatu Analisa Psikologis dalam Pendidikan*, Jakarta : Pustaka al-husna, 1989.
- Husain Qurah, *al-ushul al-Tarbawiyah fi Binai al-Manahij fi al-Islam*, Kairo, Mesir : Dar al-Maáarif, 1975.
- Ibrahim, Abdul Muñim, *Al-Bayan Syarhut Tibyan*, Maktabah Aulad Al-Syaikh, Cairo. t.th.
- Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, Sidoarjo: Khazanah Ilmu, 2016.
- John Wiles dan Joseph Bondi, *Curriculum Development : A Guide to practice*, New Jersey : Merril Prentice Hall, 2002.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, cet, II* Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Muhamad al-Thumi al-Syaibani, Umar, *min Usus al-Tarbiyah al-Islamiyah*, al-Munस्या-ah al-Ammah Tripoli libiya. 1982.
- Muhammad Ali al-Khauliy, *Qamus al-Tarbiyah : Injili Arabi*, Beirut, Libanon : Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1981.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mujam al-Mufahras li alfadz al-Qur'an al-Karim*, Darul Hadist, Cairo, 2001.
- Nasih Ulwan, Abdullah, *Tarbiyatul Aulad*. Cet. Ke 2, Darussalam Cairo.

- Nata, Abudin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Nawawi, al-Imam, *Muqaddimah al-Majmy Maktabah al-Balad al-Amin*, Cairo, 1999.
- S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, Bandung: Jemmars, edisi revisi cetakan ke-6, 1982.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Cet. I. Bandung; Remaja Rosdakarya, 1994.